

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Manggarai tahun 202, penulis dapat menyimpulkan bahwa;Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang memiliki fungsi melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran netralitas ASN. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu pada Pilkada Kabupaten Manggarai adalah:

1. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan mengenai peran Bawaslu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu Kabupaten Manggarai serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Tahap Penindakan

Upaya penanganan yang dilakukan Bawaslu belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ditemukan masalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum yang terjadi masih birokratis karena terlalu banyak melibatkan berbagai pihak sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN.

- b. Tidak tersedianya form pengajuan online untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan laporan tindak pelanggaran netralitas ASN.
- c. Belum ada temuan yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengarah kepada sanksi pasal 8 angka (4) yaitu Hukuman disiplin berat yang berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat/ jabatan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran yang dapat di kemukakan penulis sebagai berikut:

1. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran netralitas ASN dengan meminimalkan jumlah pihak yang terlibat. Membentuk tim khusus atau satuan tugas yang terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga terkait untuk menangani pelanggaran netralitas ASN. Tim ini harus memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan cepat tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
2. Menerapkan sistem digital untuk pengaduan dan penanganan pelanggaran. Platform online dapat digunakan untuk mengumpulkan laporan, memproses bukti, dan memantau perkembangan kasus secara real-time. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan pelanggaran Pemilu maupun Pilkada sehingga mempercepat proses dan mengurangi birokrasi manual.

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memastikan temuan pelanggaran disampaikan dengan jelas dan cepat. Pertemuan rutin atau pembentukan forum komunikasi khusus dapat membantu mempercepat proses tindak lanjut.